

**BENTUK EKSEKUSI TERHADAP OBYEK JAMINAN  
FIDUSIA DALAM RANGKA MELINDUNGI  
KEPENTINGAN HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN  
PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI  
DIVISI LEMBAGA KEUANGAN ASTRA DI  
YOGYAKARTA**

*The Forms of Execution upon an Object of Fiduciary Guarantee  
in Order to Protect Legal Interest of Finance Institution in  
Consumer Finance Contract in Astra Finance Company in  
Yogyakarta*

**Indira Mappangadjak<sup>1</sup> dan Mustafa<sup>2</sup>**

*Program Studi Magister Kenotariatan  
Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada*

**ABSTRACT**

The objective of this research is to analyze the form of execution upon an object of fiduciary guarantee that was chosen by Astra Finance Company in Yogyakarta in order to protect its legal interest in a consumer finance contract.

This research is juridical empirical research that is a field research strengthened by library research. The obtained data were primary and secondary data. Primary data were obtained from field research through interview with respondents and resource person. Meanwhile, secondary data were obtained from the substance of the primary, secondary, and tertiary law through library research. This research used non random sampling method, that is was not all population were given chance to be the sample, while the technique of sample intake was purposive sampling method.

The result of the research shows that the form of execution upon an object of fiduciary guarantee that was chosen by Astra Finance Company in Yogyakarta in order to protect its legal interest in a consumer finance contract is underhanded sale but the procedures do not completely follow the formal procedures. It is stated that there was not any announcement in the newspaper.

Based on this analysis then underhanded sale which is conducted by Astra Finance Company in Yogyakarta is a new form of underhanded sale which is not stipulated in regulation because the procedures are totally arranged by the Astra Finance Company as a creditor. Concerning that phenomenon, there is a sign for the birth of a new form of underhanded sale in creditor's version.

**Keywords:** *Form of execution, an object of fiduciary guarantee, consumer finance*

1. Jln. Kehutan No. 7 Kotif Palopo Sulawesi Selatan.

2. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

## PENGANTAR

Perkembangan pembangunan ekonomi tidak lepas dari lancarnya lalu lintas modal yang ada. Salah satu upaya untuk mendapatkan bantuan modal yaitu dengan adanya fasilitas pembiayaan yang dikururkan oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan bahwa perusahaan pembiayaan konsumen (*consumer finance company*) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. Pemberian pembiayaan senantiasa diikuti dengan mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberi fasilitas pembiayaan/kreditor. Hal ini tidak lain demi keamanan dan kepastian hukum pemberi fasilitas pembiayaan/kreditor. Salah satu bentuk jaminan yang digunakan adalah jaminan Fidusia.

Keberadaan Fidusia sebagai lembaga jaminan menjadi pilihan hukum tersendiri bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen. Pengertian Fidusia menurut Undang-Undang No.42 Tahun 1999, adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pada umumnya yang dapat menjadi obyek Fidusia ialah benda-benda bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada. Barang-barang yang masih akan ada dapat juga menjadi obyek Fidusia (Sofwan, 1977:31)

Pemberian fasilitas pembiayaan oleh pihak pemberi fasilitas pembiayaan dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Perjanjian ini adalah salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan buku III KUHPerduta. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1319 KUHPerduta. Perjanjian Pembiayaan Konsumen telah lahir sejak tercapainya kata sepakat diantara para pihak yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pemberi fasilitas pembiayaan dan pihak konsumen sebagai penerima fasilitas pembiayaan. Bentuk perjanjian pembiayaan konsumen lazimnya dituangkan secara tertulis dengan demikian memudahkan bagi para pihak dalam hal pembuktian dan lebih menjamin kepastian hukum. Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang pada intinya sebagai perjanjian pokok turut melekatkan perjanjian penyerahan hak milik secara Fidusia sebagai perjanjian ikutan. Obyek Fidusia dalam perjanjian ikutan tersebut adalah mobil itu sendiri dan tetap berada dalam penguasaan debitor atau penerima fasilitas pembiayaan.

Jika penerima fasilitas/debitor wanprestasi, yaitu tidak membayar angsuran hutangnya maka ditempuh jalan terakhir yaitu mengeksekusi obyek jaminan yaitu mobil. Bentuk-bentuk eksekusi jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Fidusia No.42 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Secara fiat eksekusi (dengan memakai titel eksekutorial), yang lewat suatu penetapan pengadilan.
2. Secara parate eksekusi, yaitu dengan menjual (tanpa perlu penetapan pengadilan) di depan pelelangan umum.
3. Dijual di bawah tangan oleh pihak kreditor sendiri.

Beragamnya bentuk eksekusi ini adalah salah satu kemudahan yang diberikan penerima jaminan/kreditor oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia dalam rangka melindungi kepentingan hukumnya. Penelitian ini memprioritaskan pada masalah bentuk eksekusi jaminan Fidusia dalam rangka melindungi kepentingan hukum lembaga pembiayaan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada Divisi Lembaga Keuangan Astra di Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, masalah pokok yang perlu diteliti adalah "apakah bentuk eksekusi yang dipilih oleh Divisi Lembaga Keuangan Astra di Yogyakarta terhadap obyek jaminan Fidusia dalam rangka melindungi kepentingan hukumnya dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia".

## CARA PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penelitian lapangan guna mendapatkan data primer dan untuk menunjangnya dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Adapun yang menjadi sasaran dalam penelitian ini ada dua, yaitu norma (*das Sollen*) untuk penelitian kepustakaan (*library research*) dan perilaku (*das Sein*) untuk penelitian lapangan (*field research*) (Mertokusumo, 2001: 27). Materi penulisan penelitian kepustakaan ini berasal dari data sekunder yang diperoleh dari tiga (3) bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, sekunder maupun tertier (Soekanto, 2001:3). Penelitian lapangan dilakukan dengan dengan model interviu terpimpin (*guided interview*) dan interviu bebas (*unguided interview*) dengan alat pengumpulan data yaitu pedoman wawancara dalam bentuk *semi structured* (Arikunto, 1987:183)

Penentuan sampling yang digunakan adalah teknik *non random sampling*, yaitu tidak memberikan kesempatan yang sama bagi individu di dalam populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. (Arikunto, 1987:113).

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisa secara kualitatif normatif dan ditulis dengan metode deskriptif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Lahirnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Dalam mekanisme perjanjian pembiayaan konsumen, pihak yang paling mengetahui unit mobil yang dibutuhkan dan memiliki inisiatif pertama untuk menghubungi perusahaan pembiayaan konsumen adalah konsumen itu sendiri. Sebelum menghubungi perusahaan tersebut, konsumen telah menetapkan daftar unit mobil yang diinginkan dengan harganya berdasarkan penawaran dari dealer. Konsumen kemudian mengisi formulir aplikasi yang telah disediakan perusahaan pembiayaan yang nantinya diadakan kelayakan konsumen dan meminta kelengkapan dokumen yang lain. kelayakan tersebut harus melalui proses survey, verifikasi dan validasi data yang ada.

Hasil analisa dari dokumen-dokumen dan wawancara diproses dalam DSO (*Data System Operation*) dan akan ditentukan apakah konsumen tersebut layak untuk mendapatkan keputusan kredit dari KASA (Kredit Analis Satu Atap). Setelah itu keputusan kredit diserahkan ke *Credit Admin* untuk mencetak *Purchasing Order* dan meminta tanda tangan ke pejabat yang berwenang yaitu *Representative Office Head* kemudian mengirim *Purchasing Order* dan Surat Pernyataan BPKB ke dealer. Setelah itu *Credit Admin* menerima berkas dokumen penagihan dari dealer dan juga nomor rangka, nomor gesek mesin, kuitansi pembayaran pertama, kuitansi pelunasan, berita acara serah terima dan lain-lain. Dalam tahap ini sekaligus juga menginput data kendaraan dan data kontrak konsumen untuk ditandatangani oleh pemimpin lembaga pembiayaan dan kemudian diserahkan ke *Credit Admin* lagi untuk diserahkan ke *Document Custodian* untuk disebar ke *Finance Head Office*, konsumen yang bersangkutan, dealer, asuransi dan lain-lain. Akhir dari proses ini adalah penyerahan mobil oleh kreditor ke debitor sekaligus sebagai jaminan bagi kreditor.

Pembebanan obyek jaminan dengan Fidusia dimulai pada saat

perjanjian pembiayaan telah valid dan telah mulai berjalan. Proses pembebanan Fidusia diserahkan pada notaris hingga proses pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia selesai. Untuk keseluruhan pembebanan dan pendaftarannya dikenakan biaya Rp.150.000,00. Adapun pelaksanaannya disesuaikan dengan aturan yang ditentukan oleh Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Tidak terpenuhinya salah satu ketentuan pendaftaran obyek jaminan Fidusia berakibat pihak kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia tidak akan memprosesnya. Dengan telah terdaftarnya obyek jaminan dan telah memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia maka otomatis pembebanan jaminan Fidusia secara undang-undang telah lahir.

### **Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tunggakan dan Penanganannya Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen**

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa ada beberapa sumber-sumber penyebab terjadinya tunggakan (*overdue*). Yaitu:

- a. Penyimpangan Program Pemasaran
- b. Penyimpangan Proses Persetujuan Fasilitas Pembiayaan
- c. Penyimpangan Administrasi
- d. Penyimpangan Penagihan

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi tunggakan (*overdue*) yaitu:

#### **1. Penagihan**

Untuk penagihan, pihak kreditor telah mengadakan langkah-langkah preventif. Dalam tahap ini melibatkan dua elemen yaitu *desk coll* dan *field coll*.

#### **2. Amandemen**

Yaitu adanya perubahan mengenai pola pembayaran angsuran atas permintaan debitor.

#### **3. Jaminan**

Mobil yang merupakan obyek jaminan akan ditarik oleh kreditor namun mobil tersebut tidak langsung dijual.

#### **4. PPHK (Perubahan Peralihan Hak dan Kewajiban)**

Hampir menyerupai dengan alih debitor. Ada debitor baru yang bersedia untuk melanjutkan kontrak dari debitor lama. Alasan yang lazim adalah ketidakmampuan dari debitor lama untuk melaksanakan prestasinya lagi.

### 5. Reposisi

Penarikan kembali mobil sebagai obyek jaminan guna dijual untuk pelunasan hutang dari debitor tadi.

### 6. Penghapusan/*write off*

Yaitu penghapusan tagihan lebih dari 150 hari dari catatan *aging* atau daftar berisi riwayat/*history* pembayaran bagi debitor yang raib dengan unit jaminannya sekalian.

## Bentuk Eksekusi Yang Dilaksanakan Atas Obyek Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sebagai Upaya Terakhir Melindungi Kepentingan Hukum Kreditor

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, alasan dilakukannya eksekusi atas obyek jaminan ketika konsumen/debitor wanprestasi. Bermula dari proses penarikan obyek jaminan berdasarkan surat perintah penarikan yang dikeluarkan oleh departemen *collection*. Untuk tugas ini kepadanya diberikan surat kuasa resmi yang berstempel dan telah ditandatangani oleh pihak Divisi Lembaga Keuangan Astra selaku yang dikuasakan oleh debitor/pemberi kuasa untuk melakukan penarikan obyek jaminan dan yang menerima kuasa dalam hal ini karyawan bagian departemen *Collection*.

Surat kuasa untuk melakukan penarikan obyek jaminan merupakan alas hukum yang sah bagi kreditor untuk melakukan penarikan. Surat kuasa ini berisi pernyataan yang ditandatangani oleh debitor sendiri guna memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perseroan berdasarkan perjanjian penyerahan hak milik secara Fidusia dengan nomor perjanjian pembiayaan yang telah disetujui yang selanjutnya disebut penerima kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan apabila pihak debitor selaku pemberi kuasa wanprestasi dalam hal ini lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya atau berada dalam keadaan yang menurut kreditor tidak memungkinkan bagi debitor melaksanakan kewajibannya seperti berada dalam pengampunan.

Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa setelah dilakukan penarikan atas obyek jaminan dilanjutkan dengan penjualan. Menurut Divisi Lembaga Keuangan Astra selaku kreditor, penjualan yang dimaksud disini adalah penjualan dimuka umum atau lelang namun khusus untuk kalangan terbatas yaitu dealer/supplier saja karena tidak dilakukannya pengumuman di Koran dan aturan penjualan ditentukan oleh kreditor saja. Oleh karena itu pelaksanaan lelang ini tidak dilakukan dihadapan pejabat lelang.

Dari hasil penelitian di lapangan, dianalisa bahwa pada dasarnya penjualan dimuka umum/lelang yang dilakukan kreditor bukanlah lelang sesungguhnya karena tidak dilakukan dihadapan pejabat lelang sehingga tidak bisa dimasukkan dalam bentuk parate eksekusi. Sesungguhnya yang dimaksud lelang dalam kasus ini adalah penjualan dibawah tangan.

Suatu eksekusi jenis penjualan dibawah tangan ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kesepakatan pemberi dan penerima Fidusia; syarat ini diperkirakan akan berpusat pada soal harga dan biaya yang menguntungkan para pihak
- b. Setelah lewat satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima Fidusia secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan
- c. Diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Dalam praktek di lapangan penjualan dimuka umum ini dimulai setelah melewati masa tunggakan lebih dari 60 hari. Penjualan di bawah tangan yang ada di lapangan, pihak kreditorlah yang mencari pihak ketiga sebagai pembeli. Hal ini dilakukan apabila kreditor merasa keberatan untuk menutup harga benda jaminan terlebih dahulu. Pencarian pembeli dilakukan dengan menawarkan pada rekanan bisnisnya. Barang siapa calon pembeli yang mengajukan penawaran tertinggi, dialah yang menjadi pembeli yang sah

Ada beberapa keuntungan yang menjadi alasan bagi kreditor untuk melakukan penjualan dibawah tangan yaitu:

1. Prosedur yang lebih sederhana dan juga persyaratan yang mudah. Hal ini berbeda ketika harus menempuh penjualan di muka umum.
2. Hemat biaya karena yang diutamakan disini adalah kepercayaan antara kreditor dan calon pembeli untuk saling menguntungkan (*simbiose mutualisme*). Lain halnya jika melalui penjualan di muka umum yang harus membayar bea lelang dan biaya-biaya lainnya.
3. Dengan melakukan penjualan dibawah tangan nama debitor tetap terjaga dari penilaian publik. Hal ini karena tidak diumumkan di surat kabar. Dalam hal ini hanya para pihak yang terkait saja yang tahu yaitu kreditor, debitor dan calon pembeli.

Dengan melihat syarat-syarat penjualan di bawah tangan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan kenyataan yang ada dalam praktek diatas maka penjualan dibawah tangan yang terjadi ternyata kurang memenuhi seluruh persyaratan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari tidak dilakukannya pengumuman dan kurang melibatkan partisipasi

debitor selaku pemilik barang yang akan dijual. Padahal, untuk sahnya suatu penjualan dibawah tangan harus ada kesepakatan antara kreditor dan debitor baik dari segi penentuan teknik penjualan, tempat penjualan dan harga yang akan dijual sehingga didapatkan harga jual yang menguntungkan kedua belah pihak.

Berdasarkan analisa tersebut di atas, maka bentuk eksekusi yang ditempuh oleh pihak kreditor bukanlah parate eksekusi karena tidak diakhiri dengan penjualan di muka umum dan tidak juga masuk dalam kategori penjualan di bawah tangan menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Bentuk eksekusi yang dilakukan adalah penjualan di bawah tangan secara diam-diam atau dengan kata lain penjualan di bawah tangan model baru versi kreditor karena ditentukan secara sepihak oleh kreditor saja.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam prakteknya pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Divisi Lembaga Keuangan Astra di Yogyakarta bukanlah parate eksekusi karena tidak diakhiri dengan penjualan obyek jaminan dimuka umum atau dihadapan pejabat lelang melainkan penjualan dibawah tangan secara diam-diam karena pelaksanaannya tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan formal penjualan dibawah tangan melainkan berdasarkan aturan yang ditentukan oleh pihak kreditor sendiri. Dengan demikian, lahirlah bentuk penjualan dibawah tangan baru yaitu versi kreditor.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis dapat mengajukan saran-saran, yaitu sebagai berikut:

1. Penjualan dibawah tangan yang telah diterapkan oleh Divisi Lembaga Keuangan Astra sebaiknya mengikuti prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
2. Pelaksanaan penjualan dibawah tangan yang dilakukan oleh kreditor harus senantiasa memperhatikan kesepakatan pihak debitor selaku pemilik barang yang dibebani dengan jaminan Fidusia.

## DAFTAR PUSTAKA



**Buku :**

Arikunto, Suharsimi, 1987, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Bina Aksara, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2001, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1977, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

**Peraturan:**

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Keputusan Presiden RI No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan